PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

NAMA : HUSAIMI HS

NPM : 1207350130

JUDUL :

PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERKAIT DENGAN

PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN

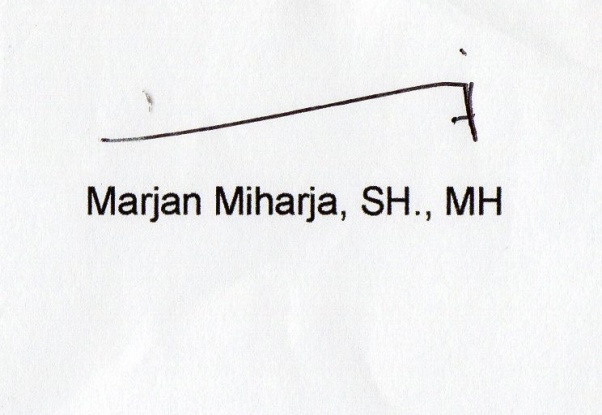
YANG SALAH TANGKAP

(Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008 )

Secara substansi telah desetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/ dipertahankan,

Jakarta, Februari 2018

Dosen Pembimbing



Marjan Miharja, SH., MH

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul

PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERKAIT DENGAN

PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN

YANG SALAH TANGKAP

( Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008 )

seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung

jawab moral penulis.

Jakarta, Februari 2018

Penulis

(Husaimi HS)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya atas kehendak dan pertolongan-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERKAIT DENGAN PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN YANG SALAH TANGKAP ( Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008 ) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jau dari kesempurnaan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis. Besar harapan untuk kiranya para pembaca yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan ilmu hukum dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari adanya bantuan berbagai pihak, baik berupa materil maupun moril. Melalui pengantar ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sujatno,S.H.MH selaku Ketua pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
2. Bapak Marjan Miharja, SH., MH selaku pembimbing materi dan teknis dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dengan penuh ketulusan dan keihklasan untuk penulis melakukan konsultasi dan bimbingan.
3. Segenap Dosen yang tanpa lelah mengajar penulis, semoga ilmu yang telah disampaikan kepada penulis menjadi ilmu yang bermanfaat.
4. Segenap pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta yang penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu jasa-jasanya.
5. Khususnya kepada kedua orang tua, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga semoga semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik di sisi Allah SWT.

Sebagai penutup perkenankanlah penulis berdo`a “Jazakumullah Khairan Kasiira, (semoga Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda)”. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Jakarta Pebruari 2018

Penyusun

HUSAIMI HS

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN. ....................................................................... ii

HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .................................... iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

ABSTRAK ............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ............................................................. 1
2. Rumusan Masalah  16
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian *..............................*  17
4. Metode Penelitian *.............. ..........................................* 18
5. Sistimatika Penulisan *....................................................*  23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG, PENYELIDIK, PENYELIDIKAN, PENAHANAN, PENANGKAPAN DAN KEWENANGAN

1. Penyidik, Penyelidikan, Penangkapan

dan Penahanan *.............................................................* 26

1. Tentang Penyelidikan *................................................* 26

2. Tentang Penyidikan *..................................................* 28

1. Tentang Penangkapan *.............................................* 29
2. Syarat Penangkapan *...............................................* 32
3. Tujuan dan Alasan Penangkapan ..*........................* 34
4. Hak dan Kewajiban Korba ......................................... 35
5. Kewenangan *.................................................................* 37
6. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang

Pemerintahan *............................................................*  41

1. Penyalahgunaan Wewenang *.............................*....... 41
2. Tindakan Sewenang-Wenang *................................* 42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap
2. Pengertian Perlindungan Hukum *..............................* 44
3. Pembuktian *................................................................* 45
4. Putusan Haklim *.........................................................* 62
5. Upaya Hukum ................*...........................................* 66 *. .*
6. Beberapa Peraturan Mengenai Penangkapan dan Penahanan
7. Penangkapan Menurut KUHAP No. 8 Tahun 1981 ... 72
8. Penahanan Meneurut KUHAP No. 8 Tahun 1981.... 77
9. Penangkapan dan Penahanan Menurut UU

Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia ..................................................... 83

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan

Tindak Pidana ............................................................. 88

1. Penangkapan dan Penahanan Menurut UU No.

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. ......... 92

1. Penangkapan dan penahanan menurut Undang-Undang

No. 1999 tentang Hak Asasi Manusia ...................... 96

BAB IV ANALISIS TENTANG KESEWENANGAN PENYIDIK DALAM

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SESUAI DENGAN Pasal 330 Jo Pasal 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981

1. Posisi Kasus *.................................................................,,,..* 99
2. Pembahasan *.......................................................................* 133

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan *...................................................................* 150
2. Saran – Saran *............................................................* 152

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERKAIT DENGAN PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN YANG SALAH TANGKAP (Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008).

N a m a : HUSAIMI HS

N P M : 1207350130

Kata Kunci : Upaya hukum, *error in persona*, kode etik Polri, tanggung jawab penyidik Polri.

Dalam penelitian dengan judul Analisa Kesewenangan Penyidik Polri dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau *Error In Persona* (Analisis Kasus Imam Chambali Alias Kemat Jombang 2008) ini penulis mengunakan metode penelitian kepustakaan sehingga memakai data-data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar ada dua hal. Pertama dilihat dari sudut terpidana sebagai korban *error in persona*, penulis ingin mencari tahu mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan dalam mencari keadilan. Selain itu mengenai hak-hak yang bisa didapatkan sebagai korban dalam hal terjadi *error in persona*. Kedua dilihat dari sudut Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum, tanggung jawab penyidik Polri menurut hukum apabila terjadi kekeliruan dalam menangkap dan menahan orang atau *Error In Persona* akibat kelalaian penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua hal di atas dapat ditemukan jawabannya dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No.81 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan terkait hukum acara pidana lainnya seperti UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Repubik Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas maka upaya hukum yang tepat yang bisa dilakukan oleh terpidana korban error *in persona* adalah upaya hukum PK, adapun pertimbangan hakim mengabulkan upaya hukum yang diajukan koraban adalah krena adanya *novum* yang diajukan pemohon, sehingga peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan bebas Terpidana berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .